

**PERAN ELITE PARTAI POLITIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT
(STUDI KASUS : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI Keadilan Sejahtera Kota
Yogyakarta Tahun 2017)**

Faris Abdurra'uf Ramadhan
Program Study Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Faris.abdurrauf001@yahoo.co.id
2018

NASKAH PUBLIKASI

PERAN ELITE PARTAI POLITIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT
(STUDI KASUS : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI Keadilan
SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017)

Disusun Oleh:

FARIS ABDURRA'UF RAMADHAN

Nim: 20140520241

Telah disetujui dan disahkan pada

Hari dan Tanggal : 2 Maret 2018

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Waktu : 13.30- 14.30 WIB

Dosen Pembimbing


Dr. Mu Kencana Syafie, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si



Ketua Program Studi Ilmu Politik

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

SINOPSIS

Partai Politik merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menjadi bagian dari pemerintahan baik itu anggota legislatif maupun anggota eksekutif. Untuk dapat menjadi pejabat publik seseorang harus mengikuti pemilihan umum dan salah satu untuk dapat mengikuti pemilihan umum yaitu dengan cara independen atau menjadi anggota dari salah satu partai politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sample Purposive Sampling dan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

ketika seseorang dengan niat yang kuat untuk menjadi pejabat publik maka tahapan dalam pemilu harus dilakukan dengan baik. Salah satu nya yaitu ketika masa kampanye. Banyak sekali janji janji visi dan misi yang disampaikan calon pejabat publik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan menang dalam pemilihan umum. ketika telah dilantik dan sah menjadi pejabat publik maka sebaik nya peran yang dilakukan oleh eit dari partai politik tersebut tetap ingat kepada masyarakat, tetap ingat dengan janji janji pada saat kampanye, dan tetap melakukan kinerja dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwasan nya peran yang dilakukan oleh elite partai keadilan sejahtera di tingkat DPRD Kota Yogyakarta dinilai oleh masyarakat masih kurang maksimal. Partai Keadilan Sejahtera harus melakukan evaluasi lebih mendalam agar kedepan elite dari Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan nilai lebih baik dimasyarakat serta mampu memberikan citra baik kepada Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Peran Elite, Partai Politik, Hubungan dengan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Berakhirnya rezim orde baru dinamika tentang islam dan politik kembali mencuat ke ranah publik yang ditandai setidaknya oleh tiga momentum. Pertama, banyaknya partai islam yang bermunculan setiap menjelang pemilu. Pada pemilu 1999 ada 20 partai islam yang menjadi peserta pemilu, pada pemilu 2004 ada enam partai islam, dan pada pemilu 2009 ada empat partai islam. Kedua, terjadinya perdebatan tentang dasar negara saat sidang tahunan MPR yang membahas amandeman UUD'45. Sebagian fraksi dalam DPR RI memperjuangkan kembali piagam jakarta sebagai dasar negara. Momentum yang demikian didukung oleh sejumlah aksi yang terjadi di beberapa daerah. Ketiga, munculnya fenomena terorisme sejak peristiwa hancurnya gedung WTC (11 September 2001) sebagai lambang keperkasaan negara Amerika. Akibatnya, sejumlah aksi terorisme domestik terjadi di tanah air. (Hamdi, 2012).

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Obyek penelitian antara lain: Pertama, PKS pada pemilu 2004 memperoleh kenaikan yang sangat signifikan, yaitu dari hanya 1,3 persen pada pemilu 1999 menjadi 7,3 persen pada pemilu 2004. Kenaikan perolehan suara ini tidak lepas dari kemampuan PKS untuk membangun partai kader yang cukup solid. Kedua, PKS memenangkan pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan antara lain, di DKI Jakarta yang dapat dikatakan sebagai salah satu barometer demokrasi di Indonesia. Karakteristik pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih yang mayoritas pemilihnya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Tidak jauh berbeda dengan Kota Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mayoritas pemilih nya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Partai Keadilan Sejahtera yang mampu bersaing dengan partai besar lainnya yang sudah mempunyai basis massa yang cukup besar. Pada pemilu legislatif Kota Yogyakarta tahun 2009-2014, PKS berhasil memperoleh 4 kursi, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi suatu partai politik dan perlu adanya evaluasi terus menerus untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan basis masa pendukungnya.

Kehidupan partai politik di indonesia masih cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai idiologi. Demi kepentingan kekuasaan, partai politik akan berlomba-lomba mencari dan merekrut berbagai macam basis pemilih. Untuk dapat mawadahi semua basis pemilih tentu hal ini akan menjadikan idiologi partai tidak lagi menjadi tola ukur dalam menyusun suatu kebijakan dan menetapkan suatu keputusan.

Proses perekrutan anggota partai politik tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik. Siapapun yang bersedia untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh partai politik dapat direkrut dan di detapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, ataupun calon kepala daera. Kemampuan berpolitik kalah saing di dibandingkan dengan materi yang dijadikan ukuran pantas atau tidak pantas nya seseorang direkrut oleh partai politik. Dari banyaknya partai islam di Indonesia mungkin hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara transparansi menyatakan proses pengkaderan nya dengan jelas. PKS juga memiliki jalur kaderisasi yang kuat.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tidak terlepas dari peran partai yang sebelumnya bernama Partai Keadilan(PK). Transformasi PK menjadi PKS dikarenakan pada pemilu tahun 1999, PK tidak mampu

mencapai ambang batas parlemen sebesar 2%. Hal ini lah yang menjadi dasar atas perubahan nama Partai Keadilan berganti nama serta lambang untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Selanjutnya PK berganti nama dan disahkan menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. (Setya dalam Efrina, 2009)

Sistem Pengkaderan yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimulai dari proses rekrutmen peserta tarbiyah. Proses perekrutan dilakukan dengan memanfaatkan komunitas yang sudah ada seperti lembaga dakwah sekolah, lembaga dakwah kampus dan lembaga dakwah lainnya. Mereka yang direkrut dan mengikuti proses perekrutan tidak bisa langsung menjadi anggota partai melainkan harus melewati beberapa tingkatan yang dimulai dari kader anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, anggota purna, dan anggota kehormatan. Hubungan fungsional dari masing masing tingkatan terlihat dari materi pendidikan politik yang diberikan sebagai pentahapan pendidikan politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai karakteristik sebagai partai politik massa yang begitu agresif. Secara ideologis, PKS menentukan pilihannya sebagai partai islam yang berbasiskan tarbiyah. Fenomena politik islam yang diwakili oleh PKS yang percaya pada jalur demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Gerakan tarbiyah banyak disebut-sebut sebagai inspirator PKS karena beberapa dari para pendiri PK pada tahun 1998 sebagai reaksi dari tekanan politik yang diberikan oleh Orba pada gerakan islam. Dalam pemilu 1999 PK mempunyai anggota 60.000 orang dan ketika sudah berubah menjadi pks pada pertengahan 2003 anggota partainya mencapai 300.000. pembukaan diri PKS pada dasarnya bukan hanya untuk menarik dukungan yang menunjukkan bentuk partai terbuka karena permainan sistematis merka tetap dipegang oleh kader-kader yang telah disiapkan sebelumnya. (Aminuddin, 2010)

Sebagai partai politik, PKS tentu melakukan komunikasi politik yang dilakukan, baik dari segi pemikiran, aktivitas, tindakan, pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan tidak terlepas dari keterbukaan ideologi partai yang mereka usung sampai saat ini. Keterbukaan ideologi tersebut menimbulkan citra baru bagi PKS, yang awalnya eksklusif menjadi inklusif. Komunikasi politik dalam suatu partai politik merupakan penghubung segala informasi ataupun pesan baik berbentuk verbal maupun non verbal terhadap masyarakat luas maupun anggota partai politik itu sendiri

Partai Keadilan Sejahtera dengan basis partai dakwah dan lebih mengedepankan nilai nilai islami menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh mengapa demikian, dikarenakan PKS sebagai partai kader yang mampu membangun citra positif dan mampu mencerminkan perilaku politik dan kinerja parpol yang islami tanpa harus bersikap ekstrim. Selain itu juga PKS dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan sangat transparansi dan hal ini yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. PKS merupakan simbol partai modern yang tidak mengandalkan figur sebagai pemersatu atau penggerak partai, akan tetapi lebih kepada bekerja atas dasar sistem dengan menempatkan kader disemua lini organisasi sebagai tokoh yang bersih, jujur, terpelajar, dan berwawasan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti **Peran Elit Partai Politik Dalam Melayani Masyarakat (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Deran Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta Tahun 2017)**".

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel Purposive Sampling, yang dimana penulis menentukan sendiri jumlah responden yang akan di jadikan sampel sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data primer adalah data yang diterima oleh peneliti secara langsung dari pihak pertama sebagai responden ataupun sebagai informan yang sifatnya sangat subyektif karena merupakan pendapat pribadi yang bersangkutan.

c. Data Sekunder

d. Data skunder adalah data yang diterima dari pihak ke tiga yang bentuknya cenderung sudah lebih objektif karena sudah di olah, data ini dapat diperoleh dari hasil kutipan terkait dengan semua informasi yang di DPD PKS Kota Yogyakarta, serta dari sumber dan dikumpulkan dari jurnal, penelitian orang lain, kantor statistik, dan monografi setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner, Kuisisioner penulis buat sedemikian rupa dimana memiliki tingkat jawaban yang akan dipilih oleh responden yaitu sebagai berikut: Sangat memuaskan, Memuaskan, Biasa saja, Kurang memuaskan, Tidak memuaskan. Dari masing-masing jawaban tidaklah diberi bobot tetapi penulis menghitung berapa banyak responden yang memilih tingkat jawaban dari kuisisioner tersebut.
- b. Wawancara, wawancara dibuat sedemikian rupa sebagai lanjutan dan pelengkap dari pertanyaan kuisisioner untuk mengetahui jawaban dari responden mengapa memilih sedemikian rupa. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yakni memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka dengan informan.
- c. Observasi, selama penelitian penulis akan mengamati secara langsung (observasi) dan mencatat tempat kejadian, waktu kejadian, serta apa saja yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian.
- d. Dokumentasi, penelaahandokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan bacaan berupa buku, jurnal, majalah, dan data tertulis lainnya. Bahan-bahan bacaan tersebut di peroleh baik dari perpustakaan maupun internet.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data dari hasil analisis teks dan wawancara, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan pengolahan data. Metode yang digunakan yaitu metode Deskriptif analisis, pelaporan data dengan menerangkan, memberi gambar, dan mengklasifikasi, serta menginterpersi data yang terkumpul apa adanya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian nya.

Data kualitatif dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis secara deskriptif yaitu sebuah analisis yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan melakukan wawancara dan membandingkan data penelitian dengan teori yang ada. Sehingga hasil akhir dari analisa ini merupakan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan suatu permasalahan dalam menggunakan informasi dan fakta yang ada. Penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, akan tetapi lebih kepada memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala yang terjadi lalu diinterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasi yang terjadi.

C. Kerangka Teori

1. Konsep Partai Politik

Menurut pasal 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multi partai, yang dimana terdapat banyak partai politik yang berdiri sebagai bentuk masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun sosial ekonomi. Surat keputusan Wakil Presiden M. Hatta nomor X/1949 merupakan titik implementasi sistem multi partai di Indonesia (Marijan, 2010). Pada pemilu 1955 terjadi pengelompokan partai menjadi dua ideologi kelompok yaitu kelompok dengan ideologi islam dan kelompok dengan ideologi sekuler. Pengelompokan partai politik tersebut hingga saat ini masih terjadi.

Menurut Ramlan Subakti dalam bukunya "Memahami Ilmu Politik", setidaknya ada dua penggolongan komposisi dan fungsi anggota partai politik yaitu antara lain:

a. Partai politik massa atau perlindungan

Yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan jumlah anggotanya dengan cara merekrut massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dimenangkan dengan mudah. Partai politik dengan ciri seperti ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lingkungan partai guna memperjuangkan kepentingannya.

b. Partai Politik Kader

Yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas yang dimiliki oleh anggotanya, ketatnya seleksi dalam perekrutan anggota, dan disiplin anggota sebagai modal kekuatan yang paling utama.

Peran partai politik adalah memberikan proses pendidikan bangsa khususnya untuk generasi bangsa, dan memberikan suatu proses pembangunan baik pembangunan politik, sosial, dan ekonomi. Adapun tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik.
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, tingkah laku, dan kebijakan para pemegang otoritas.

2. Elit Politik

Elit merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki wewenang politik. Kelas elit ini terdiri dari minoritas terorganisasi yang memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi (Mas'ood, 2006)

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok atau golongan yang terkemuka dibidang-bidang tertentu khususnya para pemangku kekuasaan. Asumsi teori elit Varma (dalam Jainuri 2001:2) mengatakan bahwa dalam masyarakat terbagi dalam dua kategori yaitu: 1) sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut sebagai: (a) elit yang berkuasa dan (b) elit yang tidak berkuasa. 2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit yang berkuasa jumlahnya relatif lebih sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan.

Selain itu juga terdapat elit politik yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya jika pada suatu saat elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan.

(Putnam dalam Haryanto: 2005, 134-45) menganalisa peran dan pengaruh elit dari prespektif: posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut: analisa posisi mengandaikan bahwa: (1) orang yang berkuasa diantara sekelompok elit adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut, (2) kekuasaan berkolerasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan, (3) analisa posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan untuk mengatahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut, (4) asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu, (5) Analisa posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat atau organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang, sementara dalam masyarakat/organisasi yang didistribusi kekuasaan merata analisis ini tidak efektif. Singkatnya analisa ini berasumsi: "siapa menduduki posisi puncak disuatu organisasi, orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi". (Haryanto, 2005)

Analisa reputasi berasumsi bahwa : (1) individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki pengaruh, (2) individu yang oleh orang dianggap memiliki kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elit.

3. Definisi Relasi

Pada umumnya antara kekuasaan politik dan kemampuan individu atau kelompok saling berhubungan erat untuk memanfaatkan kelompok sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai suatu tujuan yang di harapkan. Berbagai macam sumber yang tersedia saat ini banyak sekali seperti media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, dan tokoh masyarakat (Hidayat, 2009). Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang meunjukan hubungan ketidak setaraan. Hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur pemimpin atau oeh Weber disebut "pengawas yang mengandung perintah".

Max Weber mengatakan, kekuasaan (power) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan- kemauan atau kehendaknya, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik berupa benda dan kedudukan adalah sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu politik. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun dalam organisasi-organisasi sosial (Pratitis, 2013).

Foucault mengatakan "kuasa tidak selalu bekerja melalui represif dan intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi" (Kebung, 2008:121). Kekuasaan selalu hadir dalam aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Dimana saja manusia juga memiliki hubungan

tertentu. Dalam hal ini kemudian kuasa bekerja. Kekuasaan tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan dari dalam (Foucault dalam Khoirunnisa, 2015). Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan yaitu membantu setiap individu untuk memilih dedikasi dan disiplin diri agar menjadi yang produktif (Haryatmoko, 2003).

Kekuasaan, menurut pandangan Foucault, tidaklah memiliki (possessed) melainkan bermain/dimainkan secara terus menerus. Sehingga kebijakan yang selalu dikaitkan dengan pemerintah itu (instrumen of governance) boleh dibilang sebagai alat atau instrumen yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat didalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu. Namun, sebaiknya juga para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan kebijaka pemerintah (Zuska, 2005).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Elite PKS di Legislatif

a. Peran Pengawasan

Tabel 1. Data Respon Masyarakat Tentang Peran Elit Dalam Melakukan Pengawasan Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	29	48
3	Biasa saja	21	35
4	Kurang memuaskan	10	17
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: hasil penelitian.

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwasannya 48% menganggap puas dengan apa yang dilakukan oleh PKS Kota Yogyakarta dalam melakukan salah satu tugas nya yaitu fungsi pengawasan. Hal ini dapat di ketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat yang berada di kota Yogyakarta.

Dalam fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas dari DPRD dalam menjalankan kinerja nya dan dalam melakukan pengawasan ini dilakukan oleh beberapa perwakilan elit partai politik yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di daerah maupun di tingkat pusat. Fungsi pengawasan ini sangat diperlukan karna untuk mewujudkan terjadi nya check and ballance antara legislatif dan eksekutif.

Dilihat dari hasil analisis yang telah di bahas sebelum nya terkait dengan pengawasan masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan apa yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan di Negara Indonesia. Sebagian masyarakat hanya mengikuti alur dan perkembangan yang dijalankan oleh pemerintah.

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan para elit politik merupakan pelayan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili suara nya di pemerintahan seharusnya membuat para pejabat sadar akan hal itu sehingga roda pemerintahan dan permasalahan permasalahan yang terjadi di Indonesia bisa terselesaikan. Akan tetapi pada kenyataannya kesadaran dari para elit politik masih sangat kurang sekali elit politik yang setelah menjabat terjerat kasus korupsi, suap, dan lain sebagainya yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan adanya pesta demokrasi yaitu pemilihan umum masyarakat berhak dengan bebas menentukan calon pilihan nya yang diusung oleh partai politik untuk menjadi anggota dewan. Ketika calon yang diusung oleh partai politik tersebut berhasil mendapatkan suara banyak dan dinyatakan sah menjadi anggota dewan maka seharusnya elit parpol tersebut mengabdikan diri untuk masyarakat dan tidak lupa terhadap janji janji yang di berikan sewaktu kampanye.

b. Peran Elit Dalam Pengawasan Penganggaran

Tabel 2. Data Respon Masyarakat Tentang Peran Elit Dalam Melakukan Penganggaran Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	3	5
3	Biasa saja	41	68
4	Kurang memuaskan	15	25
5	Tidak memuaskan	1	2

Jumlah 60 100%
 Sumber: hasil penelitian.

Dari hasil tabel 2 di atas menunjukkan bahwasanya 68% masyarakat Kota Yogyakarta menganggap biasa saja terhadap peran yang dilakukan oleh elit PKS dalam melakukan penganggaran Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan PKS dalam melakukan fungsi penganggaran baik dalam mengelola keuangan internal yang dilakukan oleh PKS maupun mengelola keuangan diluar lingkup PKS seperti dalam pemerintahan, membangun sarana dan prasarana, melakukan berbagai kegiatan dan yang lainnya.

Jika melihat pada fungsi anggaran yang dilakukan oleh partai politik hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Bagaimana pengelolaan anggaran dalam suatu partai, darimana partai mendapatkan anggaran untuk melakukan kampanye ataupun kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh partai tersebut, dan masih banyak hal yang menjadi pertanyaan masyarakat untuk partai politik.

Dalam hal ini memang banyak partai politik baik partai politik yang sudah mempunyai nama besar seperti PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, PKS, PAN, GERINDRA, dan partai politik lainnya dalam hal penganggaran tidak ada yang melakukan publikasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait dengan penganggaran yang dilakukan oleh partai politik tersebut.

Peran elit PKS di DPRD Kota Yogyakarta dalam menangani penganggaran menurut masyarakat berdasarkan hasil analisis diatas masyarakat menganggap apa yang dilakukan oleh PKS biasa biasa saja dan masih sama seperti partai politik pada umum nya. Namun dari sebagian masyarakat ada juga yang beranggapan bahwasanya PKS sudah baik dalam melakukan fungsi penganggaran. PKS mampu memilih dan memilah bagaimana anggaran tersebut untuk dialokasikan. Baik untuk melakukan pembangunan ataupun untuk menunjang kegiatan yang telah di rencanakan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

Dalam fungsi penganggaran baik itu dikalangan partai politik ataupun pihak pemerintah selaku pemegang kekuasaan jarang sekali dilakukan publikasi terhadap pemasukan dan pengeluaran anggaran. Hal ini yang membuat masyarakat “buta” akan pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk daerah dikarenakan kurangnya publikasi.

Harapan dari masyarakat untuk seluruh Partai Politik yang ada di Indonesia dan pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat pusat dalam hal penganggaran lebih jelas transparansi dan publikasi agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan secara maksimal. Apabila anggaran tersebut digunakan dengan tepat sasaran maka bangsa Indonesia akan makmur dan masyarakat pun merasa hidup sejahtera.

c. Peran Elit Dalam Menyelesaikan Pemerintah Daerah

Tabel 3 Data Respon Masyarakat Tentang Masalah Pemerintah Daerah Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	10	17
3	Biasa saja	40	66
4	Kurang memuaskan	10	17
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Pada tabel 3 di atas 66% Masyarakat Kota Yogyakarta menganggap kemampuan elit PKS dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintahan daerah khususnya Kota Yogyakarta masih biasa saja. Hal ini disebabkan karena permasalahan pasti akan selalu ada dan sangat sulit untuk di hilangkan. Dalam menyelesaikan atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dibutuhkan kerjasama yang baik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini di DPRD Kota Yogyakarta hanya memiliki sedikit perwakilan dibandingkan dengan partai untuk melakukan gerakan baru atau mengambil keputusan dalam bertindak sedikit sulit karena hanya memiliki beberapa perwakilan di DPRD.

Pada penelitian kali ini penulis mencoba melakukan survey kepada masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh elit Partai Keadilan Sejahtera dalam menangani permasalahan yang terjadi di pemerintahan daerah. Dari hasil analisis yang telah di jelaskan diatas masyarakat beranggapan bahwasannya PKS dalam menangani permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta masih biasa saja.

Hal ini dikarenakan perwakilan PKS yang menjabat di DPRD Kota Yogyakarta hanya sedikit dibandingkan dengan partai lain sehingga kemampuan PKS untuk bersuara lebih dan memberikan solusi harus melalui beberapa pertimbangan dari partai lain.

Suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah apabila dikerjaskan secara bersama-sama dan dengan mengambil keputusan yang baik. Kerjasama dan musyawarah dalam menentukan suatu keputusan sangat lah penting sehingga mendapatkan suatu keputusan yang di usungkan secara bersama untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat pemerintah harus sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga harus dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui apasaja permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada pemerintah sebagai pemangku kekuasaan sebaiknya bekerja sama dengan berbagai pihak baik itu pihak swasta, masyarakat, partai politik, LSM, dan lain sebagainya agar dapat mencarikan solusi pada suatu permasalahan yang ada. Jika suatu permasalahan diselesaikan secara bersama sama maka akan lebih cepat selesai dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

d. Peran Elit PKS Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan

Tabel 4 Data Respon Masyarakat Tentang Elit PKS Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Daerah Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	12	20
3	Biasa saja	32	53
4	Kurang memuaskan	15	25
5	Tidak memuaskan	1	2
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Respon dari masyarakat Kota Yogyakarta pada tabel 4. masyarakat menyatakan 53% Elit PKS dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta masih biasa saja. Masih dalam pembahasan permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta yaitu permasalahan pembangunan. Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara menjadikan Kota Yogyakarta mengalami berbagai macam bentuk pembangunan baik pembangunan tempat wisata, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan hotel, dan masih banyak pembangunan yang lain nya hal ini menjadikan sebuah tugas pemerintah daerah Yogyakarta bekerja lebih teliti dalam mengatasi pembangunan.

Melakukan pembangunan berarti memerlukan anggaran dan juga harus melihat situasi dan kondisi daerah sekitar yang akan dibangun. Apabila melakukan pembangunan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak memperhatikan dampak yang akan datang maka akan meresahkan masyarakat dan mahluk hidup yang berada di sekitar lokasi. Kota Yogyakarta saat ini sudah terlalu banyak sekali bangunan hotel dan sangat minim akan ruang terbuka hijau. Minimnya ruang terbuka hijau maka mengurangi penyimpanan oksigen di udara.

2. Peran Elite PKS di Eksekutif

Elit partai merupakan salah satu bagian dari partai politik dimana elit partai adalah para pengurus atau pun para anggota dewan yang terpilih melalui pemilihan umum. Elit partai politik yang telah menjadi anggota pejabat publik hasil dari pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat harus tetap dilakukan pengawasan baik dilakukan oleh partai politik maupun masyarakat selain itu elit partai dan juga partai politik harus siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Masukan dan kritik yang diberikan oleh masyarakat merupakan suatu input agar elit partai dan partai politik dapat melakukan perbaikan kedepannya.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Elit Partai Keadilan Sejahtera maka penulis menyampaikan analisis sebagai berikut.

a. Peran Elit PKS Dalam Memberikan Kritik Terhadap Pemerintah

Tabel 5 Data Respon Masyarakat Tentang Peran Elit PKS Dalam Memberikan Kritik Terhadap Pemerintah Daerah Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Di Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	2	3
2	Memuaskan	16	27
3	Biasa saja	32	53
4	Kurang memuaskan	8	14
5	Tidak memuaskan	2	3
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Berdasarkan Tabel 5. 53% masyarakat menilai bahwasannya elit PKS dalam melakukan kritik terhadap pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Yogyakarta yaitu biasa saja. Masyarakat sebagai responden mengatakan seharusnya PKS memberikan Kontribusi tentang bagaimana masa depan kesultanan apakah akan dipimpin oleh sultan perempuan yang berarti tidak bisa memakai gelar Khalifatullah.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara langsung dengan masyarakat Kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu dan didapatkan hasil dan alasan sebagai berikut:

“ Masyarakat harus peduli dengan pemerintah dengan memberikan kritik yang membangun dan pemerintah harus terbuka dan menerima kritik yang di berikan oleh masyarakat maupun ormas”

“Sebaiknya pemerintah memberikan wadah untuk masyarakat menyampaikan kritik dan masukan agar pemerintah dapat langsung mengerti apa maksud dan keinginan masyarakat”
 “PKS sudah baik, karena selalu menerima kritik dari masyarakat dengan baik”
 “Sudah banyak kritik dan masukan yang di berikan oleh masyarakat namum pemerintah kurang baik dalam merespon kritik tersebut”

Berbagai alasan yang di berikan masarakat di atas dapat kita lihat bahwasannya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah kurang baik. Dari berbagai kritik yang diberikan oleh masyarkat kepada pemerintah hanya sebagian saja yang terealisasi. Keinginan dan kebutuhan masyarakat memang sangat banyak sehingga pemerintah tidak bisa merealisasikannya hal ini disebabkan karena rencana kerja pemerintah sudah di susun sejak awal tahun dan bahkan beberapa tahun sebelumnya.

Kritik yang di berikan oleh ekit partai politik, LSM, atau pun masyarakat sangat lah berguna. Kritik dan masukan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan atau pun bahan evaluasi sehingga apa yang di anggap oleh masyarakat kurang baik maka dapat dilakukan perbaikan oleh dinas atau pemerintah setempat.

b. Peran Elit PKS Dalam Berbuat Amar Ma’ruf

Tabel 6. Data Respon Masyarakat Tentang Elit PKS Dalam Berbuat Amar Ma’ruf Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	4	7
2	Memuaskan	52	86
3	Biasa saja	3	5
4	Kurang memuaskan	1	2
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Dari Tabel 6. dapat di lihat bahwasannya elit dari Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan perbuatan Amar Ma’ruf sangat disenangi masyarakat Kota Yogyakarta. Karna dari hasil survey yang di lakukan oleh penulis membuktikan bahwasannya 86% masyarakat Kota Yogyakarta merasa puas dengan apa yang di kerjakan oleh elit PKS dalam berbuat amar ma’ruf. Hal ini sangat memberikan nilai Tambah Partai Keadilan Sejahtera di masyarakat Kota Yogyakarta.

Partai Keadilan Sejahtera yang berideologikan partai islam sudah semestinya memberikan contoh yang baik, baik untuk masyarakat, untuk partai lain dan juga untuk para pejabat pemerintah setempat. Dengan berlandaskan partai islam PKS dapat merebut hati masyarkat dengan cara melakukan hal hal baik. Dalam melakukan perbuatan amar ma’ruf PKS selalu membawa simbol atau lambang partai cara ini dilakukan sebagai salah satu promosi politik agar dapat diketahui oleh masyarakat secara langsung.

Harapan masyarakat kepada partai politik dapat melaksanakan tolong menolong, bukan hanya partai politik akan tetapi semua kalangan masyarakat. Karena manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lainnya hal tersebut sudah jelas bahwasannya setiap manusia harus saling tolong menolong. Bukan hanya saja mendekati pesta demokrasi berbagai partai politik berebut mencari cara agar dapat simpati dan perhatian dari masyarakat.

c. Peran Elit PKS Dalam Berbuat Nahi Mungkar

Tabel 7. Data respon masyarakat tentang Elit PKS dalam berbuat Nahi Mungkar yang di lakukan oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	2	3
3	Biasa saja	5	8
4	Kurang memuaskan	39	65
5	Tidak memuaskan	14	24
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Bedasarkan dari tabel diatas yang di peroleh secara langsung oleh penulis dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Yogyakarta dan mendapatkan hasil bahwasannya masyarakat Kota Yogyakarta memilih 65% kurang memuaskan bahkan sebagian nya yaitu 24% memilih tidak memuaskan dengan dengan perilaku Elit PKS yang melakukan perbuatan Nahi

Mungkar. Sangat bertentangan jika kader PKS berbuat Nahi Mungkar karena tidak mencerminkan ideologi dari Partai Keadilan Sejahtera dan hal tersebut dapat merusak nama baik PKS itu sendiri.

Lebih jauh responden merasa kecewa dengan PKS apabila PKS dan kader nya tidak mampu menyebarkan kebaikan. Di Kota Yogyakarta sendiri perbuatan Nahi Mungkar sudah tidak asing dan mudah sekali untuk dijumpai seperti banyak nya perzinahan, kasus vandalisme yang dilakukan oleh kalangan yang baru menginjak remaja, perjudian, dan perbuatan nahi mungkar lainnya. Hal seperti ini apabila dibiarkan maka akan berakibat tidak baik terhadap mahasiswa dan anak anak generasi yang akan datang.

Dari hasil survey didapatkan alasan yang diberikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan perbuatan Nahi Mungkar yaitu sebagai berikut:

“Jangan membiarkan Kejahatan, jika kejahatan dibiarkan maka kejahatan akan semakin merajalela”

“sebaiknya PKS terus bergerak untuk mencegah kejahatan dan jangan pasrah sehingga di biarkan begitu saja”

“kasus kejahatan dan korupsi merupakan salah satu musuh bersama masyarakat dan harus dilawan secara bersama. Seharus nya elit partai politik sadar akan dampak yang di hasilkan dari korupsi”

“Kejahatan Korupsi meruakan hal biasa yang dilakukan oleh Elite Parti Politik dari bermacam ParPol jadi sudah tidak heran kalau para pejabat melakukan Korupsi”

“seharus nya PKS kritis terhadap kasus korupsi dan tidak ikut tergiur dengan kejahatan korupsi”

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwasan nya elit PKS masih belum tegas dalam mengatasi kejahatan termasuk kejahatan kasus korupsi. Bahkan dalam catatan kasus korupsi PKS pernah terlibat yang menimpa Lutfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS di tuding melakukan kasus korupsi daging sapi. Presiden PKS tersebut di tangkap oleh KPK di Markas Dakwah PKS Jakarta.

3. Komunikasi Elit PKS Dengan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan suatu partai politik yaitu melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Partai politik dalam melakukan komunikasi tidak harus menjelang pemilihan umum saja alangkah baiknya jika melakukan komunikasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dalam hal ini penulis akan memberikan analisis komunikasi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta dengan masyarakat kota Yogyakarta.

a. Dakwah Lisan Yang Dilakukan Elit PKS

Tabel 8. Data Respon Masyarakat Tentang Dakwah Lisan Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	4	7
2	Memuaskan	47	77
3	Biasa saja	8	14
4	Kurang memuaskan	0	0
5	Tidak memuaskan	1	2
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Dari Tabel 8 diatas yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat Kota Yogyakarta bahwasannya masyarakat Kota Yogyakarta merasa Puas dengan salah satu cara yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta yaitu melakukan dakwah lisan. 77% Masyarakat Kota Yogyakarta memiih merasa puas dengan dakwah lisan yang dilakukan oleh elit PKS diantara nya yaitu melakukan ceramah baik di masjid, kampus, dan ditempat lainnya.

Selain melakukan perbuatan Amar Ma'ruf diantara nya tolong menolong elit PKS juga melakukan dakwah lisan. Banyak hal yang dilakukan oleh beberapa elit PKS yang diminta oleh masyarakat untuk mengisi pengajian baik di masjid dengan cara mengisi khutbah Jum'at, ataupun di kampus-kampus dengan cara Liqo. Liqo ini adalah salah satu kegiatan yang sudah menjadi salah satu bagian habit atau kebiasaan yang dilakukan elit Partai Keadilan Sejahtera.

Melihat dari berbagai jawaban yang diberikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta terlihat bahwasannya PKS sudah mendapatkan citra baik di masyarakat tentang memberikan dakwah secara lisan. Dakwah yang dilakukan oleh PKS memang berbeda dengan partai politik lainnya hal ini diarekan PKS merupakan salah satu partai yang berideologi islam sehingga memang sudah selayaknya kader PKS mampu dengan baik untuk melakukan atau mengajak masyarakat untuk selalu berbuat Amar ma'ruf.

b. Peran Elit PKS Dalam Melakukan Dakwah Perbuatan

Tabel 9 Data Respon Masyarakat Elit PKS Dalam Melakukan Dakwah Perbuatan Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	1	2
2	Memuaskan	23	38
3	Biasa saja	34	57
4	Kurang memuaskan	2	3
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel 9 di atas bahwasannya 57% masyarakat Kota Yogyakarta menyatakan dakwah perbuatan yang dilakukan oleh Elit Partai Keadilan Sejahtera masih biasa saja namun 38% masyarakat juga memilih dakwah perbuatan yang dilakukan oleh elit PKS sudah cukup memuaskan.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasannya PKS sudah cukup baik dalam hal menyebarkan dan mengajak masyarakat kepada kebaikan. Elit PKS dapat memberikan contoh perilaku dan perbuatan baik ditengah masyarakat seperti contohnya para elit PKS selalu taat dalam beribadah. Selain taat dalam beribadah elit PKS juga sangat respon membantu masyarakat kecil dengan cara memberikan sembako dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini PKS mampu beradaptasi di tengah lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta.

Dari berbagai alasan terkait dengan PKS di kota Yogyakarta ada juga beberapa masyarakat yang berkomentar bahwasannya ada nya PKS di Kota Yogyakarta masih kurang bagus, "Peran PKS

di Kota Yogyakarta masih biasa saja dan tidak terlihat sangat menonjol”, namun ada juga beberapa masyarakat yang memang kurang peduli dengan dunia politik karna tidak tertarik sehingga tidak mengetahui terkait dengan politik. Selain itu karena perwakilan PKS di DPRD Kota Yogyakarta hanya beberapa saja dan hal tersebut menyebabkan peran yang dilakukan oleh perwakilan Elite PKS tidak terlihat dan hampir sama dengan perwakilan dari partai politik lainnya.

Masyarakat Kota Yogyakarta berahap PKS mampu untuk bergerak lebih dalam melakukan dakwah perbuatan. Baik itu terjun langsung ke masyarakat maupun mengajak dan meyebarkan kebaikan di pemerintah kota Yogyakarta. Agar kinerja dari pemerintahan dan masyarakat Kota Yogyakarta lebih baik. Tindak kejahatan dapat diminimalisir. Selain itu PKS diharapkan juga untuk melakukan dakwah kepada anak anak muda atau kesekolah sekolah di kota Yogyakarta. Karena anak anak lah yang kelak akan menjadi pengganti estafet kepemimpinan maka dari itu harus dibina agar menciptakan generasi yang baik.

c. Peran Elit PKS Dalam Membangun Reputasi Internal

Tabel 10 Data Respon Masyarakat Tentang Elit PKS Dalam Membangun Reputasi Eksternal Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	12	20
3	Biasa saja	45	75
4	Kurang memuaskan	3	5
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Dari tabel 10 diatas yang didapatkan oleh penulis melalui hasil penelitan dapat di lihat bahwasannya 75% masyarakat Kota Yogyakarta menganggap Elit Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun Reputasi di Kota Yogyakarta masih Biasa saja dan masih sama dengan beberapa partai politik yang ada di Yogyakarta. Hal ini disebabkan keras nya persaingan politik di Kota Yogyakarta sangat ketat dan dari berbagai partai politik tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dalam menciptakan serta membangun popularitas untuk merebut simpati Masyarakat.

Persaingan yang begitu ketat diantara partai politik yang ada di Kota Yogyakarta terlebih ketika mendekati musim pesta demokrasi menyebabkan persaingan yang sangat ketat dilakukan oleh berbagai partai politik. berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Bukan hanya beradu kreatifitas bahkan kekuatan untuk berjuang juga dilakukan demi mendapatkan hati masyarakat dan menjadikan calon yang di usung oleh partai tersebut mampu mendapatkan kursi di pemerintahan.

Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat memang sangat sulit. Masyarakat mempunyai rekam jejak dalam menentukan pilihan kepada partai politik. Masyarakat bukan hanya saja melihat dari seberapa besar nama dari partai politik tersebut, seberapa banyak kader yang di miliki oleh partai tersebut, siapa yang menjadi bakal calon, akan tetapi juga melihat apakah ketika pesta demokrasi telah berahir dan para calon terpilih telah sah melalui pelantikan maka sebarapa baik kinerja dan peran yang dilakukan oleh elite dari partai politik tersebut. Jika elite tersebut menjalankan kinerja dengan baik maka tidak menutup kemungkinan reputasi dari partai tersebut dalam pemilu yang akan datang akan meningkat dan lebih baik.

Berbekal dengan nama partai islam hal hal yang dilakukan oleh elit parpol PKS tidak mampu untuk mendongkrak citra PKS di tengah – tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat masih mempercayai kemampuan partai lain di bandingkan dengan kinerja yang di lakukan oleh PKS ataupun elit parpol PKS. Namun dengan begitu tidak menyurutkan kader dan simpatisan PKS dalam meningkatkan citra dari partai tersebut.

Masyarakat berharap kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia dan PKS untuk mendapatkan dan menciptakan reputasi atau citra yang baik lakukan persaingan politik dengan sehat dan sesuai dengan prosedur yang ada, selain itu kepada elit atau petinggi partai yang akan dicalonkan dalam pemilihan umum ataupun yang telah menjadi anggota dewan baik di legislativ ataupun eksekutiv harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan tindakan korupsi atau hal hal lain yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia khusus nya.

d. Peran Elit PKS Dalam Membangun Reputasi Internal

Tabel 11. Data Respon Masyarakat Tentang Elit PKS Dalam Membangun Reputasi Internal Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
----	---------------------	--------	--------------

1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	9	15
3	Biasa saja	35	58
4	Kurang memuaskan	16	27
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Berdasarkan Tabel 11 diatas yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kota Yogyakarta bahwasannya masyarakat Kota Yogyakarta menilai 58% Elit Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun reputasi dikalangan internal mereka sendiri masih biasa saja.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Kota Yogyakarta bahwasannya masyarakat beranggapan PKS masih menyimpan hal hal yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat. Hal hal yang menjadi rasa penasaran dari berbagai partai politik sekuler bahwasannya PKS menyimpan berbagai rahasia yaitu seperti “PKI Tempoe Duloe” diantara yaitu seperti Yel Yel, pemitosan lambang, dan pemekaaian negara Palestina sebagai daya tarik. Namun pada kenyataannya PKS tidak seperti itu. Partai Keadilan Sejahtera hanya mengikuti ajaran atau sunah Rasulullah SAW dalam membangun partai politik dan membangun dunia perpolitikan yang ada di Indonesia.

Pada penelitian kali ini seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pada bagian analisis bahwasannya penilaian masyarakat Kota Yogyakarta terhadap reputasi internal yang dibangun oleh PKS Kota Yogyakarta menganggap masih biasa – biasa saja dan memang jarang sekali internal PKS mengalami konflik yang besar. Hal ini dikarenakan kader dan elit Partai Keadilan Sejahtera selalu melakukan dakwah dan kekeluargaan yang terjalin antar kader PKS sangatlah baik dan benar – benar terjaga. Ketika terjadi konflik kecil kader PKS menyampingkan kepentingan pribadinya dan saling memaafkan di antara kader.

Masyarakat Kota Yogyakarta berharap kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia dan terlebih kepada Partai Keadilan Sejahtera dapat menjalin dan menjaga reputasi internal mereka. Dalam hal ini kekeluargaan dan kekompakan antar kader harus selalu di jaga agar permasalahan permasalahan dapat diselesaikan. Ketika permasalahan di lingkungan internal dapat diatasi maka dengan begitu suatu partai politik akan mampu memecahkan permasalahan di lingkungan eksternal partai

e. Peran Elit PKS Dalam Membangun Artikulasi Publik

Tabel 12. Data Respon Masyarakat Tentang Elit PKS Dalam Membangun Artikulasi Yang Di Lakukan Oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	2	3
2	Memuaskan	35	36
3	Biasa saja	21	58
4	Kurang memuaskan	2	3
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Berdasarkan dari tabel 12 diatas dapat dilihat bahwasannya masyarakat Kota Yogyakarta menilai 36% merasa puas dengan kinerja yang dilakukan elit Partai Keadilan Sejahtera dan perwakilan yang ada di DPRD dalam melakukan artikulasi. Namun sebagian masyarakat juga menilai 58% merasa biasa saja. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya PKS masih perlu melakukan evaluasi dalam membangun artikulasi dikarenakan hal ini merupakan suatu tujuan dari kinerja partai politik maupun para elit politik.

Melalui masa reses yang dimiliki oleh Elite politik perwakilan dari partai politik seharusnya dapat menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin sehingga ketika elite politik kembali setelah masa reses aspirasi yang di tampung tersebut dapat diajukan dan dicari jalan keluarnya.

Janji janji politik yang dilakukan ketika kampanye baik oleh partai politik maupun oleh calon anggota dewan hal tersebut yang menjadi daya jual calon tersebut dan menjadikan daya tarik masyarakat untuk memilih calon yang di ajukan oleh partai politik tersebut. Dalam kampanye beberapa elit politik tidak mempunyai keinginan apabila mereka terpilih yaitu mensejahterakan

masyarakat. Namun berbeda dengan kenyataan nya dilapangan, ketika calon yang di ajukan oleh partai politik tersebut terpilih menjadi anggota dewan seakan akan mereka lupa akan janji janji manis yang di ucapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat kecewa dengan pilihan nya. Hal seperti ini yang menjadikan kerusakan dalam pesta demokrasi yang berdampak masyarakat merasa bosan dengan janji janji para calon anggota dewan dan merasa malas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sehingga tidak peduli dengan proses pemilihan umum.

Masyarakat berharap kepada para pejabat pemerintah daerah baik di legislatif maupun eksekutif mampu bekerja sama dan tidak melupakan apa yang telah dijanjikan ketika kampanye sehingga terpilih menjadi anggota dewan. Banyak cara dalam mengumpulkan atau menyerap aspirasi masyarakat dan masyarakatpun mempunyai berbagai permasalahan yang dimana permasalahan tersebut memerlukan campur tangan dari pemerintah.

f. Peran Elit PKS Dalam Membangun Aktualisasi Publik

Tabel 13. Data respon masyarakat tentang Elit PKS Dalam Membangun Aktualisasi yang di lakukan oleh Elit PKS Kota Yogyakarta Tahun 2017.

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Presentase %
1	Sangat Memuaskan	0	0
2	Memuaskan	20	33
3	Biasa saja	33	55
4	Kurang memuaskan	7	12
5	Tidak memuaskan	0	0
	Jumlah	60	100%

Sumber: Hasil Penelitian.

Dari tabel 13 diatas yang didapatkan oleh penulis melalui hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat Kota Yogyakarta bahwasannya 55% masyarakat menilai Elit Partai Keadilan Sejahtera dalam mengaktualisasikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat masih biasa biasa saja. Namun dari beberapa masyarakat juga menyatakan bahwasannya 33% menilai apa yang dilakukan oleh Elit PKS dalam mengaktualisasikan aspirasi sudah memuaskan. Namun dilihat dari hasil survey yang didapatkan PKS masih harus berbenah agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Lebih lanjut penulis ingin mengetahui bagaimana komentar yang di sampaikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan kinerja PKS dalam mengaktualisasikan aspirasi dari masyarakat.

“Partai politik dan elite politik harus lebih sering turun kemasyarakat agar mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi ditengah tengah masyarakat”

“PKS masih harus lebih banyak terjun kemasyarakat, karena selama ini masih sama saja dengan partai lain”

“PKS sudah mampu bekerja sama dengan berbagai intansi lain untuk bersama sama menyelesaikan permasalahan”

“Jika permasalahan telah selesai diselesaikan maka jangan puas dengan satu permasalahan karena masih banyak permasalahan yang ada”

“Peran PKS masih belum terlihat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pks, pemerintah dan intansi lain yang ada di Kota Yogyakarta harus bekerja lebih untuk dapat menyelesaikan permasalah yang ada”.

Dari komentar yang ada diatas dapat dilihat bahwasannya PKS masih perlu melakukan evaluasi agar kekurangan yang ada dalam PKS dapat diperbaiki. Permasalahan yang terjadi memang tiada habis nya sehingga perlu ada nya kerja sama dari semua lapisan baik masyarakat, pemerintah, intansi, dan partai politik agar permasalahan tersebut dapat di carikan solusi terbaik nya.

Pemerintah yang merupakan perwakilan dari masyarakat seharusnya dapat melayani masyarakat dengan baik. Tidak seperti sebaliknya dimana masyarakat yang memberikan pelayanan terhadap pemerintah. Karena pemerintah melakukan pekerjaan dan diberikan upah oleh negara dimana upah tersebut merupakan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara.

Pada penelitian kali ini seperti yang telah dibahas pada bagian analisis bahwasannya masyarakat menilai apa yang telah di lakukan oleh fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera dalam mengaktualisasikan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat sebagian masyarakat menilai masih biasa-biasa saja. Namun dari sebageian responden ada juga yang menilai bahwasannya apa yang telah dikerjakan oleh fraksi PKS tersebut sudah memuaskan. Dari penilaian masyarakat tersebut PKS masih memerlukan peningkatan dalam mengaktualisasikan aspirasi masyarakat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang STRATEGI ELITE PARTAI POLITIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT (STUDI KASUS : DPD PKS KOTA YOGYAKARTA) seperti apa yang telah di jelaskan dan dibahas di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Peran elit Partai Keadilan dalam memberikan peayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta dinilai masih kurang memuaskan. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan PKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih biasa-biasa saja. Peran dari elit PKS masih belum terlihat oleh masyarakat.
- b. Salah satu tujuan atau tugas pokok dari anggota DPRD baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. karena anggota DPRD terpilih melalui pemilihan

- umum yang dipilih oleh masyarakat. sehingga elite politik yang menjabat di DPRD seharusnya lebih peduli terhadap kondisi masyarakat.
- c. Dari kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas yang dilakukan oleh elite politik dari fraksi PKS itu sendiri. Partai Keadilan Sejahtera harus bekerja lebih ekstra agar mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dan menjadikan nilai tambah bagi PKS dalam pemilu yang akan datang.
 - d. Dalam susunan anggota DPRD Kota Yogyakarta fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera hanya mendapatkan 4 kursi dari total 40 kursi yang ada hal ini lah yang menjadikan faktor utama elite Partai Keadilan Sejahtera belum dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dikarenakan dalam memberikan suara masih kalah dengan fraksi dari partai lain.
 - e. Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta merupakan salah satu partai yang memiliki basic masa tidak terlalu besar di bandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, PDIP di Kota Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah memiliki basic masa yang besar. Di DPRD Kota Yogyakarta PDIP meraih kursi terbanyak 15 kursi dan PKS hanya mendapatkan 4 kursi dari total 40 kursi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta (Tribun Jogja , 2014). Hal tersebut membuat PKS memiliki sedikit ruang di DPRD Kota Yogyakarta dan menyebabkan kinerja dari fraksi PKS kurang terlihat di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.
 - f. Dari segi kuota kursi yang dimiliki oleh PKS di DPRD dan basic masa yang tidak terlalu banyak di wilayah Kota Yogyakarta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS juga dirasa kurang banyak melakukan kegiatan dalam hal mempromosikan diri dan meraih simpati masyarakat. Mempromosikan atau memperkenalkan diri kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu partai politik. Hal tersebut menjadikan senjata utama bagi partai politik. Masing-masing partai politik mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam melakukan promosi kepada masyarakat. PKS yang merupakan salah satu partai islam seharusnya mampu memiliki berbagai kegiatan positif sehingga dari kegiatan tersebut menjadikan ciri khas dan senjata bagi PKS untuk mendapatkan massa yang lebih banyak. Namun sayangnya DPD PKS Kota Yogyakarta masih minim akan melakukan promosi kepada masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di jelaskan di atas, sebagai penutup penulis memberikan beberapa saran tindak antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Saran untuk setiap partai politik agar dapat mengikuti dan melaksanakan proses pemilihan umum dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga setiap calon akan melaksanakan proses pemilihan umum dengan baik. Pemilu merupakan sebuah titik awal dalam menjalankan roda pemerintahan yang akan datang. Baik atau buruknya suatu pemerintahan akan diawali oleh proses pemilihan umum yang di pilih oleh masyarakat dan diyakini bahwa pilihannya mampu membawa masyarakat lebih baik.
- b. Untuk para pejabat publik yang telah terpilih harus lebih mampu memperhatikan kebutuhan masyarakat. tidak terfokus kepada diri sendiri sebagai pelayan publik dan harus siap untuk selalu terjun kemasayarakat untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi ditengah tengah masyarakat.
- c. Untuk peneliti yang ingin megembangkan penelitian ini diharapkan mampu membandingkan peran elit dari beberapa partai politik yang ada sehingga dapat mengetahui apa yang menjadikan kelebihan dan kekurangan dari suatu partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Hamdi, R. (2017). Indonesian Political Ideology, Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015. Baden-Baden : Tectum.
- Anwar, M. T. (2000). Fikih Politik: Tinjauan Partai Islam . Jakarta : Studia Press
- Bruce, c. j. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar, terjemah oleh Sahat Simamora. Jakarta: PR Rinika Cipta.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, hlm 419. Dalam Miriam budiarjo Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm 404). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, M. S. (1989). Metode Penelitian Survey . Jakarta : LP3S .
- Haryanto. (2005). Kekuasaan Elit : Suatu Bahan Pengantar. Yogyakarta : PLOD UGM .
- Haryanto, D. (1984). Partai Politik Suatu tinjauan Umum . Yogyakarta: Liberty .
- Hidayat, i. (2009). Teori Teori Politik. Malang: SETARA press.
- Kaper, A. K. (2008). Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial . jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

- kebung, K. (1997). Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika. Jakarta: Obor.
- Kolip, e. M. (2013). Pengantar sosiologi politik . Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca Orde Baru, hal 307-306. Jakarta: Kencana.
- Mas'oe'd, M. (2006). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pena, T. P. (2006). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gitamedia Press.
- Pratitit. (2013). Jurnal komunikasi malaysian. jurnal of comunication, 73.
- Prihatmoko, J. (2008). menang pemilu di tengah badai oligarki partai . Yogyakarta : Pustka pelajar .
- Sigmund Neumann, Modern Political Parties. Dalam Miriam Budiarjo Dasar-dasar Ilmu Politik (hlm404). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Sebagai Pengantar . Jakarta : Rjawali Press.
- Sudarhono, E. (1994). Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta .
- Susanto, A. S. (1983). Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Jakarta : Bina Cipta .
- Syafie, I. K. (2014). Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara .
- Varma, S. (2001). Teori Politik Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Jurnal**
- Aminuddin, M. F. (2010). Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia . Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang , 148.
- budiarjo, C. J. (t.thn.). constitutional Government and Democracy. 419.
- Efrina, S. d. (2009). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Dalam Keterbukaan Idiologi. Jurnal Kajian Komunikasi, 44.
- Muhammad Imarah,(1419H) Ma'rakatu al-mustalahat Baina al-Gharbi wa al-Islami. Dalam Devy Cahyo Puspita ningrum (2016) (ED) Analisis Wacana Parpol Islam Dalam Rubrik "Pesta Demokrasi" Harian Terbuka (hlm 25). Jakarta
- Pratitit. (2013). Jurnal komunikasi malaysian. jurnal of comunication, 73.
- Yunitamurti, N. (2004). Wacana TKW Dalam Novel "Aku Bukan Budak" dan 'Dari Tanah Haram Ke Ranah Minang" . Surabaya : Skripsi Unair .
- ZUaska, f. (2005). penghampiran Antropologi Atas Kebijakan Dan Kekuasaan (Refleksi dari Kebijakan Otonomi DAerah). Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI , Vol 1 No 3 .

Web Site

- Tribun Jogja . (2014, mei 12). Diambil kembali dari Tribun Jogja : <http://jogja.tribunnews.com/2014/05/12/pdi-p-raih-kursi-terbanyak-di-dprd-kota-yogyakarta>
- Yogyakarta, P. K. (2018, Januari 2). Pemerintah Kota Yogyakarta . Retrieved from Pemerintah Kota Yogyakarta situs resmi pemerintah Kota Yogyakarta : <https://www.jogjakota.go.id/>
- Peraturan**
- Kemenpan. (2004). Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional . Diambil kembali dari Bpn: <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Lain/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-kep25mpan22004-60>